

## **PENGARUH SISTEM TANAM PAKSA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BATANG TAHUN 1830-1870**

Oleh: Aini Sa'diyah, Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, e-mail: ainisadiyah84@gmail.com

### *Abstrak*

Krisis finansial Pemerintah Kolonial Belanda yang diakibatkan oleh Perang Jawa pada tahun 1825-1830 dan Perang Belgia tahun 1830-1831 telah mengakibatkan diberlakukannya sebuah kebijakan baru di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah Sistem Tanam Paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jendral Van Den Bosch. Tujuan utama Sistem Tanam Paksa adalah meningkatkan produksi tanaman ekspor kolonial. Rakyat kemudian diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor pada sebagian tanah mereka dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak. Di Kabupaten Batang, Sistem Tanam Paksa telah dipraktekkan pada seluruh distrik, yaitu Distrik Batang, Masin, Sedayu, Subah, Kalisalak, dan Kebumen. Komoditas ekspor utama di wilayah tersebut adalah kopi, tebu, dan nila. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut telah mengalami berbagai penyimpangan yang sangat menyengsarakan rakyat. Tidak hanya kerja penanaman, rakyat juga dibebani dengan berbagai kerja wajib lain. Praktek kebijakan tersebut telah mengakibatkan kemiskinan masyarakat Kabupaten Batang, rotasi lahan sawah basah untuk tanaman ekspor nila dan tebu telah mengakibatkan penurunan peroduksi beras. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, terdapat tiga gerakan protes yang telah dilakukan masyarakat Kabupaten Batang, yaitu demonstrasi oleh petani gula pada tahun 1842, demonstrasi oleh petani nila pada tahun 1847, dan gerakan sosial keagamaan yang berupa pelancaran kritik terhadap pemerintah kolonial maupun pejabat pribumi yang dilakukan oleh jama'ah Rifa'iyah pada sekitar tahun 1850-an.

**Kata Kunci:** *Pengaruh, Sistem Tanam Paksa, Batang*

## **THE EFFECT OF CULTIVATION SYSTEM ON SOCIAL AND ECONOMIC LIFE OF SOCIETY OF BATANG REGENCY 1830-1870**

### *Abstract*

The financial crisis of the Dutch Colonial Government caused by the Java War in 1825-1830 and the Belgian War in 1830-1831 has resulted enacted of a new policy in Indonesia. The policy was the Cultivation System implemented by Governor General Van Den Bosch. The main purpose of the Cultivation System was to increase the production of colonial export plants. People obliged to plant export plants on their partial land and then the yield submitted to the government as a tax. The Cultivation System in Batang regency has been practiced on the whole districts, namely Batang, Masin, Sedayu, Subah, Kalisalak and Kebumen Districts. The main export commodities of those districts are coffee, sugar cane and indigo. The implementation of the the system has run into various of irregularities that sorrows people so much. People not only have to planting, but also burdened with other compulsive work. The practice of those policy caused poverty of Batang Regency' s people, the rotation of wet rice fields for export plants such as nila and sugar cane decreasing rice production. In response to those policy, there are three protest movements that have been done by the people of Batang Regency, namely demonstration by sugar farmers in 1842, demonstrations by indigo farmers in 1847, and social religious movements in the form of criticism of colonial government and indigenus official which is conducted by Jama'ah Rifa'iyah in the *intellectual in his era 1850s*.

**Keywords:** *The effect, Cultuurstelsel, Batang*

## PENDAHULUAN

Batang adalah nama sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Sebelum resmi menjadi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sejak tanggal 8 April 1966 hingga sekarang, kabupaten ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengalaman historis dalam perkembangan kolonialisme di Indonesia. Keterlibatannya dengan sistem kolonial tersebut telah dimulai sejak berlangsungnya ekspansi kekuasaan Bangsa Eropa (Barat) ke bagian dunia lain di luar Eropa pada sekitar abad ke-18. Awal keterlibatan Kabupaten Batang dengan Pemerintah Kolonial Belanda dimulai sejak jatuhnya seluruh wilayah Pantai Utara Jawa ke tangan VOC.<sup>1</sup>

Puncak ekspansi kekuasaan kolonial terjadi pada abad ke-19. Abad tersebut merupakan puncak dari gerakan kolonialisme yang paling besar pengaruhnya dalam membawa dampak perubahan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bagi negara Indonesia. Salah satu kebijakan masa Kolonial yang diterapkan di Kabupaten Batang adalah Sistem Tanam Paksa atau yang sering mereka sebut dengan istilah *Cultuurstelsel*.

---

<sup>1</sup>Hal ini sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh VOC dengan Sunan Pakubuwono II dari kerajaan Mataram. Hal tersebut adalah dampak dari terjadinya peristiwa “Geger Pacinan” di Mataram tahun 1742. Lihat Krisna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, *Geger Bumi Mataram (Sejarah Panjang Perjalanan Kerajaan-kerajaan Jawa Pasca Mataram Islam)*, (Yogyakarta: Araska, 2014), hlm. 61.

Sistem Tanam Paksa adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengatasi kesulitan finansial<sup>2</sup> mereka yang diakibatkan oleh Perang Jawa pada tahun 1825-1830 dan Perang Belgia tahun 1830-1831. Usaha Pemerintah Belanda dalam memulihkan keadaan ekonomi tersebut yaitu dengan mengangkat Gubernur Jenderal baru untuk Indonesia yang bernama Johannes Van Den Bosch. diangkat menjadi Gubernur Jendral di Jawa pada tanggal 19 Januari 1830, dia adalah penasehat Raja Willem I yang memunculkan ide Sistem Tanam Paksa untuk mengatasi kekosongan kas mereka.

Van Den Bosch diberikan tugas utama untuk meningkatkan tanaman ekspor yang terhenti selama Sistem Pajak Tanah yang diberlakukan oleh Raffles.<sup>3</sup> Ciri pokok Sistem Tanam Paksa terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil tanaman pertanian mereka dan bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak. Menurut pemikiran Van Den Bosch, dengan pemungutan pajak dalam bentuk barang, maka produksi tanaman perdagangan akan dapat dikumpulkan dan kemudian dipasarkan di pasaran dunia secara luas, baik Eropa maupun Amerika.

---

<sup>2</sup>A Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 29.

<sup>3</sup>Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajah di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 352.

Ketentuan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa tercantum dalam *Stadsblad* No. 22 tahun 1834.<sup>4</sup> Wilayah utama yang dijadikan untuk mempraktikkan gagasan Van Den Bosch adalah Jawa. Daerah pelaksanaan sistem ini mencakup 18 wilayah karesidenan di Jawa, salah satunya adalah Karesidenan Pekalongan.<sup>5</sup> Pada bulan Agustus 1930, Gubernur Jenderal telah mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan penanaman tebu bagi seluruh karesidenan di Jawa.<sup>6</sup> Tanaman yang ditanam pada setiap daerah yang terlibat dalam Sistem Tanam Paksa tidaklah sama. Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sebuah karesidenan tersebut harus menanam tanaman ekspor tertentu. Salah satu contohnya adalah tanaman ekspor tebu dan nila diterapkan di Karesidenan Pekalongan karena mempunyai lahan sawah yang luas dan jumlah penduduk yang memadai.

Dalam berbagai sumber dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya, kebijakan-kebijakan Sistem Tanam Paksa yang dipraktikkan tidak sesuai dengan tujuh ketentuan yang tercantum dalam *stadsblad* tahun 1834. Diantara contohnya adalah bahwa dalam *stadblad* dijelaskan mengenai penyediaan lahan untuk Tanam Paksa akan dilakukan melalui persetujuan dengan

penduduk,<sup>7</sup> akan tetapi dalam prakteknya seluruh pelaksanaan Sistem Tanam Paksa didasarkan atas unsur paksaan.

Periode Sistem Tanam Paksa sering disebut sebagai era paling eksploitatif dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Selain pengeksploitasian terhadap sumberdaya alam Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda juga telah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya manusia, yaitu dalam hal pemanfaatan tenaga kerja. Dalam hal ini, rakyat dibebani dengan kerja wajib penanaman tanaman ekspor serta kerja wajib dalam pembangunan sarana penunjang dan lain-lain. Djulianti Suroyo mengatakan bahwa eksploitasi kolonial lebih banyak bertumpu pada eksploitasi tenaga kerja. Pada tahun 1840, tanah pertanian di Jawa yang dipakai untuk Tanam Paksa adalah 6% (tidak termasuk tanam paksa kopi), padahal penduduk petani pelaksana kerja wajib tanam mencapai 72,5% dari seluruh penduduk petani Jawa.<sup>8</sup>

Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis akan meneliti secara lebih rinci dan komprehensif tentang bagaimana kewajiban-kewajiban yang dibebankan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Batang baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Mengingat bahwa penulis juga memiliki tujuan lain untuk menambah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 354.

<sup>5</sup>Sartono Kartodirjo dan Joko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 57.

<sup>6</sup>A Daliman, *op.cit.*, hlm 32.

---

<sup>7</sup>Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op.cit.*, hlm. 354.

<sup>8</sup>A. M. Djulianti Suroyo, *Eksplorasi Kolonial Abad XIX; Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890*, (Jakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000), hlm. 4.

khasanah sejarah Batang yang merupakan tempat kelahirannya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara, prosedur, atau teknik yang dilakukan untuk mencapai hasil penelitian. Pada umumnya setiap sejarawan melakukan penelitian sejarah dengan berpedoman pada metode sejarah. Menurut Gilbert J. Garragan, metode sejarah merupakan seperangkat asas dan aturan yang sistematis yang didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis hasil-hasil yang dicapainya, yang pada umumnya dalam bentuk tulisan. Penelitian ini menggunakan 4 tahapan dalam metode sejarah, yaitu tahap heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran sumber), dan Historiografi (penulisan sejarah).

## HASIL PENELITIAN

### A. KAEADAAN UMUM KABUPATEN BATANG

Kabupaten Batang adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah Timur, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo di sebelah selatan, serta Laut

Jawa di sebelah utara.<sup>9</sup> Secara umum topografi, wilayah Kabupaten Batang merupakan perpaduan antara daerah pantai/dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan.

Pada saat Indonesia dalam zaman kerajaan Islam, Kabupaten Batang merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Pekalongan yang merupakan daerah di bawah Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam.<sup>10</sup> Kabupaten Batang adalah wilayah Kerajaan Mataram yang disebut sebagai wilayah *Pasisiran Kulon* (pesisir barat). Pada masa Tanam Paksa, Kabupaten Batang terdiri dari 6 Distrik, yaitu Distrik Batang, Masin, Sedayu, Subah, Limpung, dan Tersono. Pada waktu itu, Kabupaten Batang telah mengalami perluasan wilayah sebesar 254,9 *paal*, yaitu dari 150 *paal* pada tahun 1820 menjadi 404,9 *paal* pada tahun 1862.

Pada masa Sistem Tanam Paksa atau sekitar abad ke-18 an, populasi penduduk di Kabupaten Batang terdiri dari dua kelompok etnis, yaitu penduduk bumiputera Jawa dan penduduk bumiputera non Jawa yang terdiri dari orang-orang Tionghoa.<sup>11</sup> Di Karesidenan Pekalongan, kepadatan penduduk bumiputera Jawa cukup besar. Untuk persebarannya, penduduk bumiputera tersebut relatif merata

---

<sup>9</sup>Anonim, *Profil Kabupaten Batang*, (Batang: Pemerintah Kabupaten Batang, 2005), hlm. 10.

<sup>10</sup>Kusnin Asa dkk, *Sejarah Budaya Batang*, Jawa Tengah: Kantor Pariwisata Kabupaten Batang, TT), hlm. 5.

<sup>11</sup> ANRI, *Arsip Pekalongan No. 69/5, Politik Verslag 1859*.

di setiap distrik. Dalam Politiek Verslag tahun 1859, tercatat penduduk bumputera Jawa sebanyak 103.452 dan penduduk tionghoa sebanyak 1.075 orang. Menurut Edi Cahyono yang pernah meneliti Industri Gula di Karesidenan Pekalongan pada masa Tanam Paksa, pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang diperkirakan diakibatkan oleh perbaikan fasilitas kesehatan dan pembukaan lahan baru. Perbaikan fasilitas kesehatan yang mulai diintensifkan pada awal 1850-an dapat menekan angka kematian di Karesidenan Pekalongan.<sup>12</sup>

Secara historis, Kabupaten Batang merupakan bawahan dari Kerajaan Mataram Islam yang menganut struktur sosial tradisional. Dalam hal ini, hubungan sesama warga masyarakat desa disatukan oleh ikatan desa, sehingga mereka merupakan masyarakat yang komunal. Jika ikatan desa itu merupakan ikatan yang bersifat horizontal, maka untuk menjalin hubungan penduduk dengan kelompok lapisan sosial di atasnya secara vertikal dikenal dengan ikatan feodal. Ikatan ini merupakan jalinan hubungan lama antara kelompok pemegang kekuasaan dengan rakyat jelata.<sup>13</sup> Masyarakat Kabupaten Batang pada masa Sistem Tanam Paksa terdiri dari golongan priyayi dan wong cilik. Golongan priyayi di daerah tersebut

adalah golongan pejabat pemerintah kolonial yang terdiri dari Bupati, Demang, Mantri, Guru, dan lain sebagainya. Sedangkan golongan Wong Cilik mengacu pada rakyat kebanyakan, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam golongan priyayi atau kaum elite. Mereka terdiri dari para petani, buruh, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Golongan Wong Cilik kebanyakan adalah petani yang tinggal di pedesaan dan terdiri dari beberapa tingkatan sosial. Penduduk desa terdiri dari empat lapisan sosial, yaitu lapisan paling atas yang terdiri dari golongan pendiri desa yang dikepali oleh lurah,<sup>15</sup> selanjutnya adalah *sikep*, *bujang* dan *menumpang*, serta *wong boeroeh* atau *koelie* dalam lapisan terakhir.

Perekonomian masyarakat Kabupaten Batang sejak sebelum diberlakukannya Sistem Tanam Paksa adalah diberlakukan kedalam kelompok sistem ekonomi tradisi. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya untuk memecahkan persoalan ekonominya dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial. Di Pulau Jawa, lembaga-lembaga sosial dinamakan oleh Burger sebagai suatu ikatan desa seperti yang sudah dijelaskan dalam bab stratifikasi sosial. Dalam masyarakat yang perekonomiannya diatur secara tradisional, pada umumnya

---

<sup>12</sup>Edi Cahyono, *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*, (Bandung: Lbour Working Group, 2001), hlm. 38.

<sup>13</sup>Burger, D.H., *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, (Jakarta: Pradnyaparamita, 1962), hlm. 93.

---

<sup>14</sup>Wasino, *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan Penguasaan tanah di Pedesaan Jawa*, Semarang: Unnes Press, 2006, hlm. 25.

<sup>15</sup>Pada beberapa desa dalam Distrik Batang dan Masin, peranan lurah dipegang oleh wedana, dengan menggunakan pengaruhnya sebagai penatoes. Lihat Edi Cahyono, *op.cit.*, hlm. 53.

mereka mengarahkan faktor produksi. Hasil produksinya hanya untuk memenuhi konsumsi sendiri dan hampir tidak diperjualbelikan.<sup>16</sup> Dalam sistem perekonomian tradisi, perekonomian masyarakatnya akan bersifat statis. Perubahan hanya akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan dalam kualitas serta kuantitas perubahan yang sedikit sekali.

Dalam bidang politik, Kabupaten Batang telah mengalami 2 periode pemerintahan. Periode pertama sering disebut dengan pemerintahan Batang lama, yaitu pemerintahan Kabupaten Batang sejak zaman kerajaan Mataram Islam sampai pemerintahan kolonial Belanda (sejak awal abad 17 hingga 31 Desember 1935). Periode kedua adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, yaitu sejak 8 April 1966 hingga sekarang. Berdasarkan sistem pemerintahan dalam Mataram Islam, setiap wilayah pasisiran dikepalai oleh seorang bupati. Setelah daerah pesisir jatuh ke tangan pemerintah kolonial, maka bupati-bupati tersebut menjadi bupati pemerintah kolonial. Pemerintah Kolonial Hindia menganut sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Mereka memanfaatkan ikatan perhambaan yang terjadi antara rakyat dengan pejabat-pejabat pribumi. Dalam hal ini para bupati kemudian disebut sebagai bupati gubernemen yang

---

<sup>16</sup>Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, (Yogyakarta: Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVII) – PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989), hlm. 31.

menjadi pegawai dan digaji oleh pemerintah kolonial.<sup>17</sup>

## 1. Pelaksanaan Tanam Paksa Perkebunan di Kabupaten Batang.

a. Cara Pemerintah Kolonial Memperoleh Lahan Untuk pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Bagi petani, tanah pertanian menentukan posisi dalam kehidupan mereka. Tanah menjadi suatu hal yang penting sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lebih dari itu, pemilikan tanah juga sebagai penentu status sosial masyarakat.<sup>18</sup> Pada zaman feodalisme Jawa hingga zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, semakin luas tanah yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi status sosial yang disandangnya.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, pemerintah kolonial perlu mendapatkan lahan pertanian untuk penanaman wajib komoditas ekspor. Berkaitan dengan itu, pada tahun 1830 dikeluarkan peraturan baru tentang tata cara mendapatkan tanah pertanian dari penduduk. Tanah pertanian yang diperuntukkan bagi sistem ini diperoleh dengan cara mendapat persetujuan dari penduduk desa yang memegang hak atas tanah yang

---

<sup>17</sup>Handinoto, *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa Pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 228.

<sup>18</sup>Wahyu Nugroho, *Pagilaran Kabupaten Batang Tahun 1998-2000, skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2007), hlm. 17.

bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan *staatsblad* nomor 22 tahun 1834, Mengenai luas tanah yang digunakan untuk penanaman komoditas ekspor adalah tidak lebih dari 1/5 tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Dalam rangka untuk menjamin tercapainya kepentingan mereka, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian memperkuat hubungannya dengan birokrasi pejabat pribumi.

b. Produksi Tanaman Wajib Masa Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa diperkenalkan oleh pemerintah kolonial secara perlahan antara tahun 1830 dan 1835. Menjelang tahun 1840, sistem ini sudah sepenuhnya berjalan, dengan adanya beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Di Karesidenan Pekalongan, tanaman ekspor utama yang wajib ditanam adalah kopi, tebu, dan nila.

Kabupaten Batang sudah membudidayakan tebu sejak sebelum masa Tanam Paksa. Pada tahun 1837, berdiri sebuah pabrik gula di wilayah Distrik Batang yang mengelola hasil perkebunan tebu seluas sekitar 400 *bau*. Pabrik tersebut bernama Kecapi, milik pengusaha Belanda yang bernama P. D. Van Blomme Stelin.<sup>19</sup> Dalam hal ini, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian membuat kontrak dengannya untuk menyanggupi memenuhi sebagian besar keperluan industri, yaitu seperti menyediakan tenaga kerja untuk menjamin penyediaan tebu yang akan diproduksi oleh pabrik. Dalam tahun 1840 an sudah sebanyak

88 desa di Kabupaten Batang yang terlibat dalam *Cultuurdienst* tebu.

Seperti halnya tebu, kopi juga termasuk jenis tanaman yang sudah dikenal masyarakat Batang sebelum diberlakukannya Sistem Tanam Paksa. Tanaman ekspor Kopi pada umumnya ditanam pada perkebunan-perkebunan dengan pembukaan lahan baru yang tempatnya jauh dari pemukiman petani penggarap. Salah satu bentuk nyata dari hal tersebut adalah pembukaan hutan di daerah dataran tinggi di wilayah Pagilaran pada sekitar tahun 1840 an.

Berdasarkan data statistik tahun 1862, terdapat 4 distrik di Kabupaten Batang yang terlibat dengan tanaman wajib kopi. Wilayah tersebut meliputi Distrik Sidayu, Subah, Kalisalak, Kebumen. Pada tahun tersebut, jumlah tanaman kopi di Kabupaten Batang sebanyak 3.429.593 pohon dengan jumlah 16.836 keluarga yang terlibat dalam penanaman komoditas ekspor tersebut.<sup>20</sup>

Masyarakat Kabupaten Batang sudah mengenal tanaman nila sejak sebelum pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. VOC telah memperkenalkan tanaman nila pada hampir semua daerah di pesisir utara Jawa pada akhir abad ke-18. Pada tahun 1835 terdapat 3 pabrik yang mengolah hasil perkebunan nila di Kabupaten Batang, yaitu pabrik nila Kecapi yang terdapat di Distrik Masin pabrik nila Limpung yang terletak di Distrik Kalisalak menghasilkan, dan pabrik nila

---

<sup>19</sup>ANRI, *Arsip Perkebunan No. 518*, Berisi tentang daftar pabrik gula di Jawa.

---

<sup>20</sup>ANRI, *Arsip Pekalongan No. 83/B/3Nb. 45, statistiek van de Residentie Pekalongan in het alagemen 1862*.

Tersono yang terletak di Distrik Kebumen.<sup>21</sup> Di Kabupaten Batang tanaman ekspor nila memiliki perkembangan yang cukup baik. Dari awal diterapkannya hanya berdiri 2 pabrik pada tahun 1833, hingga kemudian pada tahun 1850 menjadi 5 distrik yang membudidayakan nila, yaitu semua distrik di Kabupaten Batang kecuali Distrik Subah.

c. Produksi Tanaman Pendamping Masa Sistem Tanam Paksa

Wilayah Kabupaten Batang berada dalam iklim tropis dan memiliki tanah-tanah yang subur. Selain ditanami tanaman-tanaman ekspor, mereka juga menanam tanah-tanah sawah dan tegalan untuk kebutuhan hidup mereka. Sawah-sawah kering mereka tanami dengan kacang tanah, ketela, jagung, dan sayur-mayur, selain itu juga dikembangkan jenis tanaman padi kering (*wet rice*). Adapun untuk tanaman utama pada lahan sawah basah adalah padi. Selain perkebunan kopi, tanah tegalan juga ditanami dengan pohon kelapa, kina, dan lain-lain. Budidaya tanaman ekspor masa Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Batang dalam jumlah kecil antarlain tanaman kelapa dan kina.

Pohon kelapa (*Cocos Nucifera*) adalah salah satu komoditas ekspor kolonial yang dimanfaatkan untuk minyak goreng, bahan alat masak, dan sebagai pelengkap

maskawin.<sup>22</sup> Di Karesidenan Pekalongan, pohon kelapa juga sudah ditanam sejak sebelum diberlakukannya Sistem Tanam Paksa. Pada masa Sistem Tanam Paksa, pohon kelapa ditemui di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Batang.<sup>23</sup>

Tanaman pendamping lain yang dibudidayakan di Kabupaten Batang pada masa Sistem Tanam Paksa adalah pohon kina. Kina adalah salah satu tanaman ekspor pada masa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang berfungsi sebagai obat-obatan. Tanaman ini diperkenalkan di Indonesia pada abad 18, yaitu karena pada saat itu sedang terjadi peningkatan drastis pada kebutuhan kina di pasar internasional.<sup>24</sup> Di Kabupaten Batang, tanaman kina dikembangkan oleh seorang pengusaha Belanda yang bernama E. Blink. Dia adalah seseorang yang memerintahkan pembukaan hutan belantara untuk lahan perkebunan nila dan kopi di daerah Pagilaran pada tahun 1840. Eakan tetapi hasil panen dari kedua komoditi tersebut kurang memuaskan, pada tahun

---

<sup>21</sup>ANRI, *Arsip Perkebunan No. 46*, Berisi laporan *Residen Pekalongan kepada Gubernur Jendral di Batavia mengenai ikhtisar perbandingan keadaan Karesidenan Pekalongan sebelum dan sesudah diadakannya Tanam Paksa*.

---

<sup>22</sup>Di daerah seperti Bogor, VOC memerintahkan kepada setiap penduduk yang akan menikah untuk membeli bibit pohon kelapadari penghulu kemudian mereka tanam pada rumah-rumah pejabat yang sudah ditentukan. Sementara di Priangan, setiap orang yang akan menikah diharapkan terlebih dahulu menanam satu sampai dua pohon kelapa di tanahnya sendiri.

<sup>23</sup>ANRI, *Arsip Pekalongan No. 83/B/3Nb. 45, statistiek van de Residentie Pekalongan in het alagemen 1862*.

<sup>24</sup>J. Stroomberg, *Hindia Belanda 1930*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2018), hlm. 201.



1899 wilayah tersebut kemudian diganti dengan teh hingga sekarang.<sup>25</sup>

## 2. Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Tanam Paksa di Kabupaten Batang

Penulisan sejarah sosial dan ekonomi di Indonesia pada abad 19 pada dasarnya tidak dapat lepas dari Sistem Tanam Paksa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai kebijakan baru untuk meningkatkan eksploitasi di tanah jajahan. Para penulis Sistem Tanam Paksa seperti Van Soest, Pierson, Clive Day, Gongrijp, serta penulis lainnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem ini telah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.<sup>26</sup> Dampak Sosial dan Ekonomi pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Batang sebagai berikut.

### a. Kemiskinan

Dalam berbagai penelitian, proses penanaman tanaman wajib pada masa Sistem Tanam Paksa sangatlah memberatkan masyarakat. Kebijakan tersebut telah menimbulkan dampak sosial berupa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Jawa. Hampir semua peraturan Tanam Paksa yang tercantum dalam *stadblads* nomor 22 tahun 1834 tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Rakyat dibebankan dengan penanaman tanaman ekspor dan bahkan berbagai macam kerja wajib yang sangat

menyita waktu untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri.<sup>27</sup>

Betapa sulitnya rakyat menghadapi Sistem Tanam Paksa dapat tergambar sebagai berikut. Misalnya dalam tanaman kopi, tanaman yang saat itu dianggap paling menguntungkan dalam perdagangan ekspor tersebut hanya cocok ditanam pada lahan dataran tinggi dan kering. Di daerah tersebut penduduknya jarang sehingga pekerjanya didatangkan secara paksa dari dataran rendah yang keahlian mereka adalah bersawah. Belum lagi jarak yang ditempuh sekitar puluhan kilometer membuat mereka tidak jarang harus meninggalkan desa mereka berbulan-bulan lamanya.<sup>28</sup> Lebih dari 20 persen keluarga petani Karesidenan Pekalongan terserap untuk membudidayakan kopi. Sehingga ada kemungkinan bahwa kaum tani yang terlibat dalam perkebunan kopi juga diserap untuk kerja di sektor produksi agrikultur ekspor lainnya.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, lahan sawah basah penduduk harus berotasi denangan tanaman ekspor tebu dan nila. Hal ini mengakibatkan rakyat tidak lagi dengan bebas untuk menanam padi yang merupakan kebutuhan pokok pada lahan mereka. Tanah rakyat yang semula hanya diwajibkan 20% untuk penanaman komoditi

---

<sup>27</sup>Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan (Kajian Sosial Ekonomi)*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

<sup>28</sup>Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 130.

<sup>29</sup>Edi Cahyono, *op.cit.*, hlm. 36.

---

<sup>25</sup> Wahyu Nugroho, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>26</sup>Van Niel, Robert, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hlm. viii.

ekspor kemudian bertambah menjadi hampir seluruh tanah masyarakat yang dilibatkan untuk penanaman. Lahan sawah basah untuk penanaman padi kemudian semakin bergeser untuk tanaman tebu dan nila. Rakyat kemudian menanam tanaman padi untuk kebutuhan pokok mereka pada lahan sawah kering dengan hasil lebih buruk dari yang biasa ditanam pada lahan sawah basah. Selain itu, rotasi lahan padi dengan kedua tanaman ekspor tersebut juga menurunkan kesuburan tanah. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, rakyat kemudian harus membeli beras hasil impor dari karesidenan lain dengan harga cukup mahal.

b. Perlawanan Penduduk

Memasuki abad ke-20, dampak dari eksploitasi kolonial semakin terasa di lingkungan masyarakat Kabupaten Batang. Penderitaan dan kemiskinan penduduk sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka. Hal tersebut berakibat terhadap adanya berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para penguasa saat itu. Di Kabupaten Batang, tercatat 3 perlawanan penduduk yang terjadi pada masa Sistem Tanam Paksa, yaitu gerakan protes oleh petani perkebunan tebu tahun 1842, gerakan protes oleh petani perkebunan nila tahun 1847, dan gerakan sosial keagamaan pada tahun 1850 an yang berupa peluncuran kritik terhadap pemerintah kolonial.

Masyarakat Kabupaten Batang melakukan gerakan protes pertamanya pada tahun 1842. Berdasarkan laporan dari jaksa besar Prawiro Widjojo, dalam aksi protes tersebut masyarakat menuntut beberapa hal

seperti berikut:<sup>30</sup> Petani menolak bagian tanah yang harus dikerjakan untuk ditanami tebu karena kondisi tanah tersebut buruk, petani menuntut kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden, dan petani menolak menanam paparan tebu karena pekerjaan untuk mengolah tanaman milik petani sendiri belum selesai.

Pada tanggal 24 Oktober ratusan masyarakat Kabupaten Batang berbondong-bondong menuju rumah residen di Pekalongan.<sup>31</sup> Terdapat 51 desa yang terlibat *cultuurdienst* tebu yang masyarakatnya terlibat dalam gerakan protes tersebut.<sup>32</sup> Akan tetapi perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh rakyat, pemerintah justru menangkap 4 orang yang dianggap sebagai profokator dalam gerakan protes tersebut. Mereka kemudian dijatuhi hukuman dibuang ke penjara diluar Karesidenan Pekalongan pada awal November 1842. Hal tersebut mengakhiri gerakan protes masyarakat dengan tanpa membuahkan hasil, mereka tetap kembali bekerja di lahan mereka masing-masing dengan tanpa kenaikan upah. Peristiwa semacam itu kembali terjadi pada tahun 1847, yaitu berasal dari para petani di

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

<sup>31</sup>Besluit 2 Februari 1843 No. 11, dalam ANRI: Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848.

<sup>32</sup>Saat itu di Kabupaten Batang terdapat 88 desa yang terlibat *cultuurdienst* tebu. Lihat Edi Cahyono, *op.cit.*, hlm. 94.

beberapa desa yang diwajibkan untuk menanam nila.<sup>33</sup>

Selain dua gerakan protes yang dilakukan secara langsung dengan melakukan demonstrasi, di kabupaten ini juga terdapat gerakan sosial keagamaan yang berupa pelancaran kritik terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok Rifa'iyah atau jama'ah dari Kyai Ahmad Rifa'i. Kyai Rifa'i adalah seorang kyai pendatang di desa Kalisalak Kabupaten Batang sebagai bentuk pengasingan. Kyai Rifa'i merupakan tokoh agama yang disegani di Kalisalak.

Selain paham keagamaan, Kyai Rifa'i juga menanamkan sentimen dan kritik terhadap Pemerintah Kolonial dan pejabat pribumi yang dianggap membantu pemerintahan kolonial. Gerakan protes Rifa'iyah memang tidak sampai pada tahap perang fisik, akan tetapi gerakan mereka berhasil membuat kekisruhan dan mengguncangkan stabilitas politik. Setelah memiliki jama'ah yang kuat, gerakan protes terhadap pemerintah mulai dilakukan secara terang-terangan. Gerakan protes ini dilakukan di masjid-masjid umum. Khotbah dan pengajiannya mengecam para pejabat lembaga keagamaan yang diangkat dan menghamba kepada pemerintah kolonial. Sementara pejabat pemerintah pribumi sejak dari lurah sampai bupati dikecam sebagai

kaum feodal dan kaki tangan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan kepada orang kafir. Dalam masalah keagamaan mereka dianggap sebagai anjing dan babi.<sup>34</sup>

Gerakan dari kaum Rifa'iyah mendapat simpati yang sangat positif dari masyarakat umum, sentimen anti kolonial dan birokrat tradisional juga semakin meluas. Pejabat-pejabat pribumi yang merasa terancam kewibawaannya kemudian melaporkan tindakan Kyai Rifa'i yang menganggap kafir pemerintahan tradisional dan tidak mau mentaatinya. Hingga pada akhirnya beliau diasingkan ke Ambon berdasarkan keputusan No. 36 tanggal 7 Mei 1859.<sup>35</sup>

c. Penurunan Produksi Beras Sebagai Barang Dagang di Kabupaten Batang.

Rotasi lahan pertanian sawah basah terhadap tanaman ekspor tebu dan nila telah menimbulkan penurunan produksi beras di Kabupaten Batang. Kabupaten Batang adalah suatu wilayah yang pada masa Kerajaan Mataram Islam merupakan bagian dari Karesidenan Pekalongan. Di bawah pengaruh kerajaan tersebut, selama abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, Pekalongan berhasil menjadi lumbung pemasok beras ke luar Jawa seperti Makassar ataupun karesidenan-

---

<sup>33</sup>Besluit 2 Februari 1843 No. 11, dalam ANRI: Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848.

---

<sup>34</sup>Yumiati, *Gerakan Rifa'iyah di Kalisalak Kabupaten Batang Tahun 1859-1924, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2007), hlm. 56.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 61.

karesidenan lain di Jawa yang saat itu mengalami defisit beras. Bahkan setelah pengaruh VOC, produksi beras Pekalongan masih sanggup memasok beras ke Batavia dan Semarang.

Eksistensi beras sebagai barang dagang di Karesidenan Pekalongan tidak dapat dipertahankan sejak awal abad ke-19. Hal tersebut diakibatkan oleh diberlakukannya Sistem Tanam Paksa mengakibatkan pemanfaatan lahan-lahan sawah secara intensif untuk kepentingan produksi agrikultur ekspor dunia nila dan tebu. Selain menggusur lahan penanaman padi produksi agrikultur tersebut juga telah menyerap tenaga kerja yang besar.<sup>36</sup>

Dalam laporan tahun 1835 tentang ikhtisar perbandingan keadaan Pekalongan sebelum dan sesudah Tanam Paksa, residen Pekalongan, Praetou mengatakan bahwa diberlakukannya Sistem Tanam Paksa sejak tahun 1830 telah mengakibatkan hancurnya produksi beras sebagai barang dagang Karesidenan Pekalongan. Produksi beras di karesidenan tersebut kemudian hanya untuk memenuhi kebutuhan setempat saja. Bahkan sejak tahun 1832, untuk mencukupi kebutuhan setempat pun harus mengimpor beras dari karesidenan-karesidenan lain. Sebuah laporan tentang produksi beras dalam Karesidenan Pekalongan menunjukkan kemerosotan produksi dari 48.231 pikul di tahun 1829, turun menjadi 40.915 di tahun 1830, dan pada tahun 1836 hanya tinggal

7.885 pikul.<sup>37</sup> Seiring berjalannya waktu, terjadi perluasan lahan perkebunan tanaman ekspor dan pendirian pabrik-pabrik untuk pengolahan tanaman tersebut telah mengakibatkan defisit beras terus berlangsung hingga berakhirnya Sistem Tanam Paksa.

Berdasarkan data tahun 1862, seluruh distrik di Kabupaten Batang lebih banyak memproduksi padi varietes baru yang dapat ditanam pada lahan sawah kering. Dampak berkurangnya produksi beras bagi masyarakat adalah bahwa mereka kemudian harus membeli beras dagang dengan harga mahal. Harga beras melonjak dari 69 gulden per koyang di tahun 1831 menjadi 148 gulden pada tahun 1846.<sup>38</sup>

## B. KESIMPULAN

Batang adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang adalah salah satu wilayah yang ikut membudidayakan tanaman-tanaman untuk kepentingan ekspor pemerintah colonial pada masa Tanam Paksa. Wilayah yang luas serta kepadatan penduduknya telah mengakibatkan Kabupaten Batang dilibatkan dalam penanaman komoditi ekspor tebu dan nila. Selain itu, wilayah ini juga memiliki tanah tegalan yang cukup luas hingga diwajibkan menanam tanaman ekspor kopi.

---

<sup>36</sup>Mubyarto (dkk), *op.cit.*, hlm. 21.

---

<sup>37</sup>Besluit 8 Februari 1847 No. 1, dalam ANRI: Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848.

<sup>38</sup>Edi cahyono, *op.cit.*, hlm. 34.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa sangatlah memberatkan masyarakat. Hampir semua peraturan Tanam Paksa yang tercantum dalam *stadblads* nomor 22 tahun 1834 tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Rakyat dibebankan dengan penanaman tanaman ekspor dan bahkan berbagai macam kerja wajib yang sangat menyita waktu untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Akibat yang terjadi adalah kemiskinan yang melanda masyarakat.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Batang telah mengakibatkan kemiskinan hingga menimbulkan gerakan protes petani. Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Batang melakukan aksi gerakan protes dengan dua cara. Berdasarkan Besluit 2 Februari 1843 No. 11, gerakan protes pertama dilakukan oleh rakyat dengan berbondong-bondong mendatangi kantor residen di Pekalongan. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1842 oleh petani-petani yang terlibat dalam *cultuurdienst* tebu, dan pada tahun 1847 oleh petani-petani yang terlibat dalam *cultuurdienst* nila. Akan tetapi kedua aksi tersebut tidak dapat mengubah nasib rakyat, mereka harus tetap melakukan kerja paksa penanaman tebu maupun nila sampai batas waktu berakhirnya kebijakan.

Model gerakan protes yang kedua adalah gerakan sosial keagamaan yang berupa pelancaran kritik terhadap pemerintah Kolonial Belanda maupun pemerintah pribumi. Hal tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Rifa'iyah atau jama'ah dari

Kyai Ahmad Rifa'i. Seperti dua gerakan yang dilakukan sebelumnya, gerakan ini juga tidak membuahkan hasil yang baik untuk memperbaiki nasib masyarakat. Pemimpin mereka, kyai Rifa'i justru kemudian diasingkan ke Ambon pada tahun 1859.

Edi Cahyono mengatakan bahwa dampak ekonomi yang terjadi akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Karesidenan Pekalongan adalah hancurnya beras sebagai barang dagang di wilayah ini. Dalam hal ini pemerintah mencoba mengatasi dengan penanaman jenis varietas padi baru berupa padi genjang yang memiliki kualitas buruk dan dapat ditanam pada lahan sawah kering dengan waktu yang lebih singkat. Di kabupaten ini kemudian hampir semua produksi padi yang ada adalah jenis padi genjang. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak dapat menutupi defisit beras yang terjadi, masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan utama mereka dengan membeli beras dagang dengan harga mahal. Harga beras melonjak dari 69 *gulden* per *koyang* di tahun 1831 menjadi 148 *gulden* pada tahun 1846.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- ANRI, *Arsip Perkebunan No. 46*, Berisi laporan *Residen Pekalongan kepada Gubernur Jendral di Batavia mengenai ikhtisar perbandingan keadaan Karesidenan Pekalongan sebelum dan sesudah diadakannya Tanam Paksa*.
- ANRI, *Arsip Perkebunan No. 518*, Berisi tentang daftar pabrik gula di Jawa.

- ANRI, *Arsip Perkebunan No. 1624*, Berisi laporan tahunan Karesidenan Pekalongan 1834-1865.
- ANRI, *Arsip Pekalongan Box 9 bundel 20/5, Boek v.d. rijst leverantiev. Paccalongans, Batang en Wieradessa, 1791, 1809-1813*, 1 band, berisi berkas mengenai persediaan padi di Pekalongan, Batang, dan Wiradessa.
- ANRI, *Arsip Pekalongan No. 70a/2, Politieke Verslagen v.d. R Pekalongan over de jaren 1867-1873*.
- ANRI, *Arsip Pekalongan No. 82/1 B, statistiek van de Residentie Pekalongan 1820*.
- ANRI, *Arsip Pekalongan No. 83/B/3Nb. 45, statistiek van de Residentie Pekalongan in het alagemen 1862*.
- ANRI, *Arsip Pekalongan No. 87.6*, Berisi tentang laporan bulanan tanaman indigo pada tahun 1850.
- Buku**
- A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- A. M. Djuliaty Suroyo, *Eksplorasi Kolonial Abad XIX; Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890*, Jakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.
- Anonim, *Profil Kabupaten Batang*, Batang: Pemerintah Kabupaten Batang, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Basuki Soenardjo, *Sejarah Perjuangan Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang*, Batang: Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Batang, 1991.
- Bayu Patriasari (dkk), *Citra Kota Pekalongan Dalam Arsip*, Jakarta: ANRI, 2016.
- Breman, Jan, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Boomgaard, Peter, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial Dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta: Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVII) – PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Edi Cahyono, *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*, Bandung: Lbour Working Group, 2001.
- Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian (Proses Perubahan Ekologi di Indonesia)*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- Handinoto, *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa Pada Masa Kolonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Hiroyoshi Kano, Frans Husken, Djoko Suryo, *Dibawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa Di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- J. Stroomberg, *Hindia Belanda 1930*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2018.
- Kusnin Asa dkk, *Sejarah Budaya Batang, Jawa Tengah*: Kantor Pariwisata Kabupaten Batang, TT.
- Krisna Bayu Aji, *Geger Bumi Mataram (Sejarah Panjang Perjalanan*

*Kerajaan-kerajaan Jawa Pasca Mataram Islam*), Yogyakarta: Araska, 2014.

Linblad, Thomas, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia (Berbagai Tantangan Baru)*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000.

Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan (Kajian Sosial Ekonomi)*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Marwati Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan (Kajian Sosial Ekonomi)*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991..

Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2007.

Sartono Kartodirjo dan Joko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Tanto Sukardi, *Tanam Paksa di Banyumas: Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan, dan Dampak Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajah di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Van Niel, Robert, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003.

Wasino, *Tanah, Desa, Dan Penguasa (Sejarah Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Di Pedesaan Jawa)*, Semarang: UNNES Press, 2006.

### Skripsi dan Tesis

Wahyu Nugroho, *Pergolakan Sosial Petani Teh Pagilaran Kabupaten Batang Tahun 1998-2000*, skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2007.

Yumiati, *Gerakan Rifa'iyah di Kalisalak Kabupaten Batang Tahun 1859-1924*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2007.

### BIODATA

Nama : Aini Sa'diyah

Tempat Tanggal Lahir: Batang, 18-12-1997

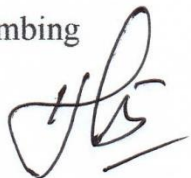
Riwayat Pendidikan : MII 01 Rowosari

MTs Nurul Huda  
Banyuputih

MA NU 01  
Banyuputih

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Pembimbing



Mudji Hartono, M.Hum  
NIP.19550115 198403 1 001

Reviewer



Dina Dwikurniarini, M.Hum  
NIP. 19571209 198702 2 001